

Tata Kelola Lahan Berdasarkan Teknik Pemetaan Partisipatif dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut (Studi Kasus: Desa Makmur Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)

Land ControlBased Participatory Mapping Technique in Peatland Fire (Case Study: At Makmur Jaya Village, Indragiri Hilir Regency Riau Province)

Besri Nasrul¹, Surnadi², Arifudin¹, Nurhayati¹

¹Fakultas Pertanian Universitas Riau

Telp. : 0761-72126 ext. 123, Fax : 0761-674681

²Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau

BalitbangProvinsi Riau Jl. Diponegoro no.24 Pekanbaru

Email: besrinasrul@gmail.com

ABSTRACT

Participatory mapping is done by involving village governments and communities in the process of preparing village maps and land governance. Vulnerable locations are a reference in determining the place for implementing land management and related village groups. Supervision and application of social sanctions for village rules can run optimally for arsonists from inside the Makmur Jaya Village and outside the village. Prevention of fire from peatlands around oil palm plantations of PT. The BNS went well in accordance with the objectives, namely the capacity of the target village community to increase, whereas the number of hotspots became decreasing or nonexistent. The way to clear slash and burn land began to be abandoned along with the emergence of awareness of the dangers of burning land after land management activities through this participatory mapping technique. Burning coconut husk is also recognized as the cause of land fires, especially the long dry season. This research was conducted in the village of Makmur Jaya, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. This type of research is qualitative. Data collection is done by FGD and literature study. The results of the study, village regulations on land governance are one of the most important outputs of mentoring activities so that fire-prone villages have written rules about fire prevention. Keywords: participatory mapping, land governance, fire prevention, peatland

ABSTRAK

Pemetaan partisipatif dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat dalam proses penyusunan peta desa dan tata kelola lahan. Lokasi rawan menjadi acuan dalam menentukan tempat pelaksanaan pengelolaan tata kelola lahan kelompok desa yang terkait. Pengawasan dan penerapan sanksi sosial aturan desa dapat berjalan optimal terhadap pelaku pembakaran yang berasal dari dalam DesaMakmur Jaya dan luar desa. Pelaksanaan pencegahan kebakaran lahan gambut di sekitar perkebunan kelapa sawit PT. BNS berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan, yakni kapasitas masyarakat desa sasaran menjadi meningkat, sebaliknya jumlah titik api menjadi menurun atau tidak ada. Cara pembukaan lahan cara tebas bakar mulai ditinggalkan seiring dengan munculnya kesadaran akan bahaya dari pembakaran lahan pasca kegiatan tata kelola lahan melalui teknik pemetaan partisipatif ini. Membakar sabut kelapa juga disadari sebagai penyebab terjadinya kebakaran lahan, terutama musim kemarau panjang. Penelitian ini dilakukan desa Makmur Jaya,

Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Jenis penelitian adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara FGD dan study literatur. Hasil penelitian, peraturan desa tentang tata kelola lahan merupakan salah satu keluaran terpenting dari kegiatan pendampingan sehingga desa rawan kebakaran memiliki aturan tertulis tentang pencegahan kebakaran.

Kata Kunci: pemetaan partisipatif, tata kelola lahan, pencegahan kebakaran, lahan gambut

PENDAHULUAN

Lahan gambut merupakan timbunan bahan organik yang mudah terbakar jika dalam keadaan kering (Agus & Subiksa, 2008). Kobaran api dapat merembet jauh ke lapisan bawah, bersifat tidak menyala dan berasap putih. Deteksi dini maupun tindakan pemadaman menjadi sulit dilakukan sebab alat-alat pemadam api sangat sulit menjangkau lokasi titik kobaran api dan membutuhkan air lebih banyak. Kebakaran gambut skala besar biasanya berhenti seiring datangnya musim hujan.

PT. Bhumireksa Nusasejati adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang budidaya perkebunan kelapa sawit. Seluruh arealnya 25.759 ha merupakan areal gambut. Luas areal yang sudah tertanam hanya sebesar 18.667ha, sisanya berupa okupasi/pecadangan (5.512 ha), pabrik, dan infrastruktur. Banyak bagian dari wilayah okupasi tersebut yang tergolong rawan kebakaran menurut data NOAA 18 tahun 2013/2014. Pengamatan lapangan tahun 2011-2015, jumlah kejadian kebakaran atau titik api (*hot fire*) di okupasi dan luar kebun dalam radius ± 5 km (60 titik api) lebih banyak dibandingkan kejadian kebakaran di dalam kebun (4 titik api). Kejadian kebakaran disebabkan oleh kebakaran luar kebun yang merembet begitu cepat saat kemarau panjang. Menurut Hiromitsu (2010); PHKA & JICA (2014), tiga penyebab kebakaran desa, yaitu 1) Kemarau panjang pada

lahan gambut yang telah direklamasi; 2) Perilaku masyarakat yang membakar saat pembukaan lahan; dan 3) Penggunaan lahan yang tidak terencana, konflik batas lahan, konflik sosial lainnya. Berbagai upaya pengendalian seperti penyusunan peraturan, pembentukan lembaga, koordinasi vertikal-horizontal atau pusat-daerah, pemantauan, dan pemadaman api telah dilakukan namun pengendalian kebakaran masih berjalan lambat karena: (1) masih terpusat pada pemadaman sedangkan pencegahan atau mengurangi sumber api belum dioptimalkan; (2) peran para pihak mulai dari tingkat kementerian/lembaga, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya (perusahaan) belum sepenuhnya mampu memfasilitasi dan meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi untuk menjamin pencegahan kebakaran di tingkat lapangan secara lebih baik (Arifudin, et al, 2012).

Untuk itu, usaha dan tindakan bersama melalui keterpaduan para pihak lintas sektor tersebut dalam hal kebijakan, hukum, dan pendanaan merupakan jaminan pengurangan sumber api sebagai penyebab kebakaran (Arifudin, et al, 2012). Upaya pencegahan kebakaran melalui pendampingan desa-desa rawan kebakaran merupakan sebuah model dari peran nyata tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) perkebunan kelapa sawit PT. BNS. Penerapan peraturan dan sanksi mengurangi faktor manusia sebagai sumber api sangat

membutuhkan pengawasan yang ketat di lapangan (desa) agar dampaknya berkelanjutan. Ketidakhahaman perilaku gambut akibat ketidaksiadaan informasi tingkat lapangan (desa) terutama data-data keruangan telah mengakibatkan banyaknya keputusan penggunaan lahan yang belum memperhatikan watak gambut. Kedepan diperlukan upaya memetakan sumberdaya lahan desa yang memungkinkan semua masyarakat desa terlibat secara bersama-sama dalam menganalisis permasalahan dan potensi desa dalam rangka merumuskan perencanaan tata kelola lahan desa. Pada pelaksanaannya, masyarakat desa sendiri dapat menentukan sendiri topik pemetaan desa, proses, tujuan dan manfaat peta yang dihasilkan seperti memperjelas batas desa di lapangan dan membuat patok batas, memperjelas hak masyarakat atas tanah terkait dengan masalah tenure atau klaim tapal batas dari pihak luar (PT. BNS), menyusun rencana pengelolaan lahan tidur, dll. Kegiatan pemetaan desa partisipatif adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyusunan tata ruang desa sesuai dengan Undang-undang Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996. Bagi kepentingan pemerintah daerah kabupaten, hasil pemetaan desa partisipatif diharapkan dapat dijadikan acuan awal untuk menyusun peta batas administrasi yang merupakan komponen utama dalam menyusun tata ruang atau paduserasi daerah.

Tujuan

- a. Mendampingi masyarakat dalam pemetaan desa agar masyarakat bisa mengetahui potensi dan masalah desa.
- b. Meningkatkan kapasitas swadaya masyarakat dalam pemanfaatan lahan

dan pengelolaan sumber daya alam lainnya melalui tata kelola lahan sehingga pada akhirnya terwujud desa-desa mandiri ramah lingkungan di sekitar perkebunan kelapa sawit PT. BNS.

BAHAN DAN METODE

Strategi Pelaksanaan

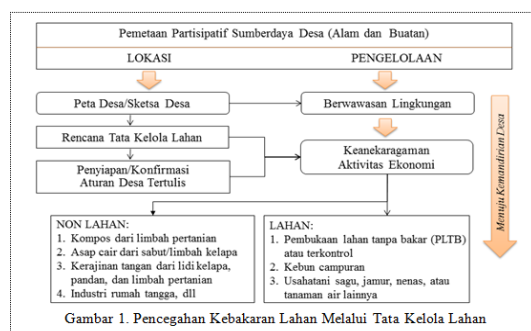
Pada tingkat desa, pengembangan alternatif jaminan pencegahan kebakaran di sekitar izin usaha perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu bentuk keterpaduan para pihak dalam memperkuat upaya-upaya pengendalian kebakaran yang sedang dilakukan saat ini. Implementasi pencegahan juga dimungkinkan dengan terbitnya Inpres Nomor 16 tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan melalui kegiatan pencegahan, pemadaman, dan pemulihan, serta kerjasama dan saling koordinasi pusat-daerah atau vertikal-horizantal, meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (termasuk perusahaan), serta meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat kegiatan pembakaran.

Pencegahan kebakaran lahan gambut berbasis desa di sekitar perkebunan kelapa sawit PT. BNS dilaksanakan dengan strategi pendampingan desa yang difasilitasi oleh tenaga pendamping guna meningkatkan kapasitas swadaya masyarakat melalui pendekatan pengaktifkan lembaga desa, tata kelola lahan desa, dan penganekaragaman kegiatan ekonomi desa sebagai jaminan pencegahan kebakaran di tingkat lapangan (desa). Indikator keberhasilan optimalisasi tata kelola lahan adalah (a) jumlah titik api di desa sasaran yang rawan kebakaran tersebut

menjadi berkurang atau bahkan menjadi hilang sama sekali; (b) tumbuhnya kemampuan masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan rencana kegiatan pertanian yang menguntungkan dan ramah lingkungan.

Mekanisme Implementasi Tata Kelola Lahan.

Tata kelola lahan desa dilaksanakan dengan menguatkan status kepemilikan lahan. Teknik yang digunakan adalah pemetaan partisipatif, yaitu teknik *participatory rural appraisal* yang menyediakan informasi peta desa dan peta tata kelola lahan dalam upaya pencegahan kebakaran desa dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat desa. Peta yang dihasilkan dapat mengontrol langsung kepada pemilik lahan dan penggarap atau penanggung-jawabnya kejadian kebakaran. Selain itu, tata kelola lahan desa dapat dilaksanakan dengan menguatkan kearifan lokal/aturan lokal yang mengatur dan mengawasi pembukaan lahan. Rumusan konsep pendekatan pendampingan desa melalui tata kelola lahan (Kartika, at al.2013) Gambar 3. Peta Tata Kelola Lahan Desa Makmur Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir disajikan pada Gambar 1.



Penganekaragaman mata pencaharian masyarakat desa melalui fasilitasi keberagaman ekonomi

melalui: 1) Pengembangan perilaku yang tidak bergantung pada lahan seperti pembukaan lahan tanpa bakar, pembakaran sabut kelapa secara perlahan dan terkontrol, kebun campuran, tanaman air seperti sagu, jamur, nenas, dll; 2) Penganekaragaman mata pencaharian lahan seperti usaha pembuatan kompos, asap cair dari sabut/limbah kelapa, kerajinan tangan dari lidi, dll; 3) Membangun kerjasama lintas sektor para pihak sebagai insentif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi dan Pengumpulan Data

Sosialisasi kegiatan pemetaan desa dilaksanakan di kantor desa yang dihadiri oleh aparat desa, tokoh masyarakat, MPA, dan PT. BNS. Berdasarkan kesepakatan, personil

MPA mewakili desa untuk pelaksanaan pemetaan desa di lapangan. Data-data sekunder yang dikumpulkan adalah sketsa pemekaran wilayah Desa Makmur Jaya (dulunya disebut Desa Sungai Dendan) dan wilayah desa induk Sungai Simbar, monografi desa, serta catatan statistik lainnya.

Pembuatan Sketsa Desa

Sketsa lebih mengutamakan kandungan informasi tentang potensi sumberdaya desa dan masalahnya seperti tata batas, sungai, parit, kebun kelapa, lahan tidur, dll sehingga meskipun tidak dilengkapi koordinat dan skala tapi sketsa sudah dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan tata kelola lahan dan peraturan desa.

1. Kepala Desa mengundang tokoh kunci (kepala dusun, kepala parit, dll) sebagai narasumber. Pendampingan mempersiapkan

- tempat yang memadai dan peralatan (pencil, spidol, plano, dll).
2. Wawancara untuk menggambarkan keadaan umum dan hasilnya dijadikan acuan dalam pembahasan potensi, masalah, dan harapan desa:
 - a) Menyepakati bagian wilayah parit/dusun yang akan dipetakan, jenis-jenis sumberdaya, serta simbol-simbolnya,
 - b) Narasumber membuat batas dusun pada media kertas, terlebih dahulu tentukan arah Utara pada peta,
 - c) Mencantumkan objek penting lainnya seperti jalan, sungai, kebun kelapa, kantor desa, lahan tidur, terbakar, dll.
 3. *Focus discussion group* (FGD) dusun merupakan diskusi kelompok dusun (kelapa dusun dan tokoh masyarakat) untuk membicarakan sejarah dan kondisi umum, mengali potensi sumberdaya lahan, masalah, dan pemecahannya. Ketika menemui masalah dan potensi, rumuskan pernyataannya dengan mencantumkan pokok permasalahan, kapasitas (panjang, lebar, jumlah), dan lokasi masalah.
 4. Pendamping mengajak peserta FGD untuk meneliti kembali dan langsung diperbaiki kalau memang diperlukan. Peta sketsa yang telah disepakati perlu diketahui oleh peserta dengan mencantumkan nama, tempat dan tanggal. Kemudian mendokumentasikan proses dan peta yang dihasilkan (Gambar 2).



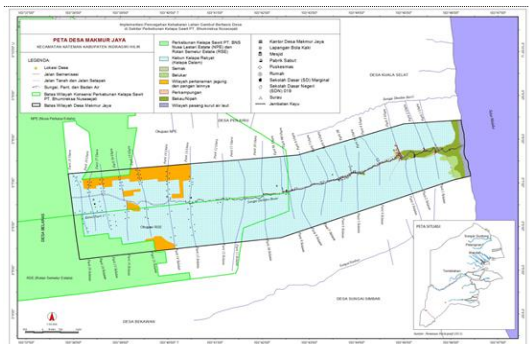
Gambar.2. FGD Peta Desa di Desa Makmur Jaya

FGD Peta Desa dan Penyajian Hasil

Pendamping mendiskusikan kembali hasil sketsa dengan tokoh kunci tingkat desa sebagai koreksi sekaligus kesepakatan hasil pemetaan. Narasumber meneliti kembali dan melakukan perbaikan kalau diperlukan. Selanjutnya juga disepakati rencana lokakarya peta desa yang melibatkan seluruh masyarakat.

Hasil peta sketsa desa dipindahkan ke dalam peta kerja menggunakan sistem grid. Media kertas yang digunakan adalah kertas milimeter atau dibuat sendiri. Penggabungan peta sketsa Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3 membutuhkan manipulasi-manipulasi agar diperoleh keseragaman skala. Peta sketsa ini selanjutnya akan dirubah formatnya menjadi data digital (Gambar 4) dengan cara penyiaman, registrasi, digitasi layar, editing, layout peta, dan percetakan. Desa Makmur Jaya mempunyai luas sebesar 60

km² dan secara administrasi terdiri atas 6 RW dan 41 RT membujur disepanjang Sungai Dendan Besar dengan 19 buah parit yang menyirip tegak lurus. Pola ini mencerminkan adanya pengaruh marin yang kuat ke arah hilir. Batas-batas wilayahnya adalah Sungai Dendan Kecil di sebelah Utara, Desa Sungai Simbar di sebelah Selatan, Desa Belaras (perkebunan kelapa sawit PT. BNS) di sebelah Barat, dan Selat Malaka di sebelah Timur.



Gambar 3. Peta Desa Makmur Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau

Kebun kelapa merupakan tanaman utama dan sumber mata pencaharian pokok bagi masyarakat (85%). Tanaman kelapa dianggap lebih hemat

lainnya. Hasil kelapa bulat dijual ke PT. Sambu Sei Guntung, Batam dan Malaysia. Rata-rata produksi kelapa bulat mencapai ± 20.000 butir dalam tiga bulan, dengan pendapatan masyarakat rata-rata \pm Rp. 3.000.000,00 dalam satu bulan. Namun hasil panen yang berlimpah tersebut, juga menghasilkan sampingan limbah sabut kelapa yang belum bisa dimanfaatkan sama sekali. Beberapa potensi dan masalah desa terkait kebun kelapa dan lahan disajikan pada Tabel 1.

Tata Kelola Lahan

Wawancara dan FGD lahan difokuskan untuk menyusun perencanaan tata kelola lahan. Berdasarkan peta desa, proses identifikasi daerah rawan kebakaran dilakukan dengan cara wawancara dan diskusi dengan aparat desa dan tokoh masyarakat. Lokasi yang rawan kebakaran berada di Dusun 3 dimulai dari Parit 13 sampai Parit 19 (Gambar 4). Lokasi rawan ini dituangkan ke dalam peta tata kelola lahan sehingga menjadi pedoman dalam menentukan tempat dan orang/kelompok yang akan terkait dalam pelaksanaan pengelolaan tata kelola lahan. Lokasi rawan

Tabel 1. Potensi, Masalah, dan Harapan Masyarakat Desa Makmur Jaya

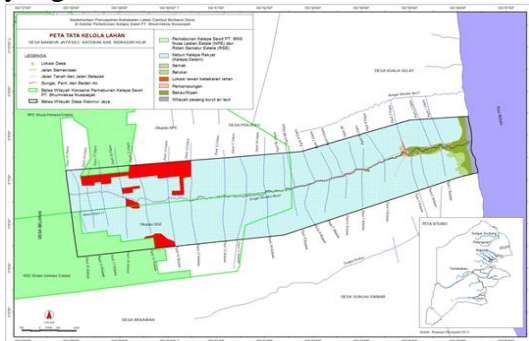
Potensi	Masalah	Solusi / Harapan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelapa ▪ Jagung ▪ Arang ▪ Sabut ▪ Pemanfaatan Pekarangan Rumah ▪ Nenas ▪ Eceng gondok ▪ Buah dan daun nipah ▪ Arisan tenaga/gotong royong 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembakaran batang jagung dan rumput saat pembersihan lahan ▪ Penumpukan dan pembakaran sabut sehingga menghasilkan asap ▪ Penghayutan kelapa sangat sulit di parit 18 dan 19 saat musim kemarau ▪ Banjir saat musim hujan (pasang keling) ▪ Lingkungan sungai masih menjadi tempat pembuangan limbah sabut 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan pemanfaatan batang jagung dan limbah pertanian untuk kompos ▪ Pengolahan asap cair dari sabut kelapa/limbah kelapa ▪ Pengolahan/pabrik sabut ▪ Pemanfaatan air kelapa (nata de coco) ▪ Kerajinan rumah tangga (pemanfaatan limbah kelapa) ▪ Pemanfaatan pekarangan rumah dengan tanaman kehidupan (pangan/sayur) ▪ Pemanfaatan buah nipah untuk bahan makanan dan daun nipah untuk atap ▪ Pengerokan sungai di Parit 18-19 ▪ Pembuatan pintu-pintu air untuk mengatur muka air parit agar tidak banjir saat pasang dan transportasi kelapa menjadi lancar

dalam pemeliharaannya tidak membutuhkan pemupukan dan pemeliharaan

kebakaran tersebut berada di dalam areal okupasi PT. BNS dan lokasi ini

berbatasan langsung dengan tanaman menghasilkan. Pada tahun 2013, lokasi ini juga pernah mengalami kebakaran besar akibat pembukaan lahan oleh masyarakat yang sedang konflik dengan perusahaan. Salah satu tindakan yang dilakukan PT. BNS dalam mengatasi konflik adalah dengan cara membuat kanal batas sepanjang areal tanaman menghasilkan.

Kejadian kebakaran gambut Parit 16 Selatan pada 22 Februari tahun 2015, disebabkan oleh pembakaran sabut kelapa saat mengupas kelapa, kemudian ditinggalkan tanpa dipadamkan terlebih dahulu. Keesokan harinya api sudah membakar lahan sendiri dan merambat ke bidang lahan tetangga. Akhirnya terjadi konflik fisik dan penyelesaian yang disepakati adalah pelaku membakar harus mengganti kelapa tetangga dengan kelapa juga dan dipelihara sampai ukurannya sama besar dengan kelapa yang dibakar.



Gambar 4. Peta Tata Kelola Lahan Desa Makmur Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir

Kejadian kebakaran gambut tanggal 5 Maret 2015 di Dusun 3 juga menyebabkan konflik sosial yang disertai dengan kekerasan fisik menggunakan senjata tajam. Penyebabnya adalah pembakaran sabut kelapa yang menghabiskan setengah bidang kebun kelapa yang berumur dua

tahun dan ribuan butir kelapa yang sudah panen. Kedua belah pihak saling menuduh melakukan pembakaran dengan sengaja sehingga menyebabkan kerugian di masing-masing pihak.

Penggunaan lahan di lokasi rawan kebakaran di Dusun 3 terdiri atas kelapa dalam (8-10 tahun), jagung, nenas, kencur, jahe, pisang tanduk, dan lahan kosong. Pembukaan lahan biasanya dilakukan dengan cara membakar. Minimal terdapat tiga motifasi yang mempengaruhi masyarakat Desa Makmur Jaya membuka lahan dengan cara membakar, yaitu motifasi ekonomi, budaya, dan sosial.

Membakar lahan untuk penanaman jagung tidak memerlukan biaya yang besar. Serasah kayu dan semak yang sudah ditebang, dikumpulkan dan dibiarkan kering kemudian langsung dibakar sehingga tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Proses ini relatif tidak memerlukan waktu yang lama sehingga proses penanaman bisa dilakukan secepatnya dan panen bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Lokakarya Desa

Lokakarya peta desa dan rencana tata kelola lahan Desa Makmur Jaya dilaksanakan di Kantor Desa pada tanggal 26 September 2015. Lokakarya dihadiri oleh aparat pemerintahan desa dan seluruh komponen masyarakat. Hasil lokakarya adalah kesepakatan peta desa, rencana tata ruang desa, peraturan desa, dan rencana strategis pembangunan desa. Konsep peta tata kelola lahan yang telah disepakati telah disahkan oleh aparat pemerintah atau tokoh masyarakat. Ringkasan proses pelaksanaan pemetaan Desa Makmur Jaya disajikan lengkap pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Proses Pelaksanaan Pemetaan Desa Makmur Jaya

No.	Kegiatan Pencegahan Kebakaran	Tempat	Waktu	Keterangan
1	Sosialisasi program pemetaan	Kantor desa	1 hari	Menetapkan narasumber masing-masing dusun/RT
2	Mengumpulkan peta dan data sekunder	Desa, kecamatan, kabupaten	7 hari	Pendamping
3	Pembuatan Sketsa Desa	Tempat yang disepakati	30 hari/ dusun	Wawancara dan FGD
4	Pembuatan Peta Kerja	Pendamping	15 hari/ dusun	Pendamping
5	Diskusi hasil pemetaan	Kantor desa	2 hari	Wawancara dan FGD
6	Pertemuan Lokakarya Desa	Kantor desa	1 hari	Dihadiri oleh aparat desa, dan warga masyarakat
7	Penyajian Hasil Peta Desa	Kantor desa	30 hari	Setelah kesepakatan

Aturan Tata Kelola Lahan Desa

Aturan desa tentang tata kelola lahan merupakan salah satu keluaran terpenting dari kegiatan pendampingan sehingga desa rawan kebakaran memiliki aturan tertulis tentang pencegahan kebakaran desa. Pengawasan dan penerapan sanksi sosial dapat berjalan optimal terhadap pelaku pembakaran yang berasal dari dalam desa, sedangkan pelaku pembakaran yang berasal dari pemilik lahan luar desa maupun perusahaan mekanisme pemberian sanksi dilakukan dengan mengoptimalkan peran dinas terkait dan sebagainya dalam menguatkan pelaksanaan kebijakan misalnya melalui penegakan sanksi administratif.

Selain itu, abu sisa pembakaran dapat bermanfaat sebagai pupuk, sehingga tanah menjadi subur dan tanaman tidak perlu dipupuk lagi.

Teknik membuka lahan dengan cara membakar sudah menjadi kebiasaan turun temurun, malah jika tidak segera dibakar maka pemilik lahan sekitarnya akan protes karena tumpukan limbah berpotensi menjadi sarang hama (monyet, babi, tikus, dll) sehingga membahayakan tanam yang sudah lebih dulu ditanam. Selain itu, hampir seluruh wilayah desa mengalami banjir besar setinggi 0.5-1 meter setiap tahunnya. Biasanya banjir besar tersebut terjadi di awal bulan September.

Pelatihan Tematik

Guna penguatan kapasitas masyarakat maka berdasarkan kebutuhan dan harapan desa, kelompok tani yang berfungsi sebagai MPA telah mendapatkan pelatihan-pelatihan tematik: a) Pemanfaatan limbah sabut kelapa menjadi asap cair; b) Pemanfaatan limbah pertanian menjadi pupuk kompos; c) Pelatihan keterampilan berbahan dasar lidi kelapa menjadi anyaman, piring lidi, wadah minuman, lampu hias, dll; d) keterampilan berbahan dasar sabut kelapa menjadi sapu, tali, keset kaki, dll.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pencegahan kebakaran lahan gambut di sekitar perkebunan kelapa sawit PT. BNS berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan, yakni kapasitas masyarakat desa sasaran menjadi meningkat, sebaliknya jumlah titik api menjadi menurun atau tidak ada. Wilayah Desa Makmur Jaya tersebar di kawasan rawa pasang surut dengan fisiografi lahan tanggul sungai yang dipengaruhi kondisi marin, rawa belakang, dan gambut. Kebun kelapa tersebar diantara 19 batang parit yang semuanya bermuara ke Sungai Dendan. Lahan gambut yang rawan pembakaran berupa hamparan lahan kosong yang terkadang ditanami jagung dan nenas, terletak di Dusun 3 (Parit 13 sampai dengan Parit 19). Semua lokasi rawan

tersebut berada di dalam areal okupasi PT. BNS. Pada tahun 2013, lokasi ini pernah mengalami kebakaran besar akibat pembukaan lahan yang sengaja dibakar oleh masyarakat.

Upaya mencegah kebakaran lahan gambut dilaksanakan dengan cara memetakan potensi sumberdaya dan masalahnya. Peta desa menggambarkan lokasi rawan pembakaran sehingga menjadi dasar penyusunan aturan desa tertulis terkait tata kelola maupun rencana strategis pembangunan desa nantinya. Cara pembukaan lahan cara tebas bakar mulai ditinggalkan seiring dengan munculnya kesadaran akan bahaya dari pembakaran lahan pascakegiatan tata kelola lahan melalui teknik pemetaan partisipatif ini. Selain itu, membakar sabut kelapa sudah mulai disadari sebagai penyebab terjadinya kebakaran lahan, terutama musim kemarau panjang.

Untuk keberlanjutan tujuan program pencegahan kebakaran, perlu kerjasama dan kolaborasi dengan Pemerintah daerah Indragiri Hilir dan para pihak untuk mensinergiskan program pembangunan daerah, sehingga terjadi saling dukung program pemerintah daerah dan program CSR perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, F. dan Subiksa, I.G.M. 2008. Peatland: the Potential for Agriculture and the Environmental Aspects. Balai Penelitian Tanah and World Agroforestry Centre (ICRAF) SE Asia, Bogor, Indonesia.
- Arifudin, Nasrul, B. Maswadi. 2012. *Program Of Community Empowerment Prevents Forest Fires In Indonesian Peat Land*. ELSEVIER *Procedia*

Environmental Sciences 17 (2013) 129-134.

PHKA dan JICA. 2014. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Bersinergi dengan Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan di Sekitar Kawasan Konservasi. Laporan Akhir. Kementerian Kehutanan (PHKA) dan *Japan International Cooperation Agency*.

Hirimitsu, K. 2010. Work Implementation Plan of Long-term Expert Services for Community-based Fire Prevention. Inception Report. Japanese Technical Cooperation Project for Program of Community Development of Fire Control in Peat Land Area. Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation (DGFPNC), Ministry of Forestry (MOF) and JICA. 29 p.

Kartika, A.S., Isbanu, Nasrul, B., Arifudin, Putra, R., Maswadi. 2013. *The Guide-Book (Seri 1-8) for Land and Forest Fire Prevention of Village-based in Peatland Area*. Book-1 for Authorities Concerned and Stakeholder; Book-2,3,4,5,6,7,8 for Village Facilitators and Training. *Program of Community Development of Fires Control in Peatland Area, Forest Departement RI-Japan International Cooperation Agency (JICA)*.